



BERTAMBAH DIBANDING TAHUN INI

DPRD Yogya Targetkan 14 Raperda Sepanjang 2026

YOGYA (KR) - Legislatif dan eksekutif berhasil menetapkan target pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) pada tahun depan. Total ada 14 raperda yang menjadi tanggung jawab DPRD Kota Yogya untuk dituntaskan sepanjang tahun 2026 mendatang.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Yogya Tri Waluko Widodo, menyebut total target Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 bertambah dibanding tahun ini. "Kalau tahun ini ada 12 Propemperda. Alhamdulillah semua bisa dituntaskan sehingga sesuai ketentuan

kita bisa menambah hingga 25 persen. Makanya di tahun 2026 nanti kita sepakati targetnya naik menjadi 14 Propemperda," urainya, usai sidang paripurna penetapan Propemperda 2026 di gedung dewan, Rabu (26/11).

Dari 14 target Propemperda 2026 tersebut tiga raperda di antaranya merupakan urusan wajib yang

meliputi pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dan neraca anggaran. Kemudian lima raperda merupakan inisiatif legislatif dan enam raperda sisanya merupakan inisiatif eksekutif.

Widodo, menyebut lima raperda yang menjadi inisiatif legislatif tersebar merata di masing-masing alat kelengkapan. Yakni Komisi A terkait keterbukaan informasi publik, Komisi B terkait pemberdayaan UMKM, Komisi C menyangkut inovasi daerah, Komisi D tentang kota layak anak, dan Bapemperda berkaitan perlindungan perempuan dan

anak korban kekerasan.

Sedangkan enam raperda yang menjadi inisiatif eksekutif beberapa di antaranya merupakan penyesuaian regulasi di atasnya seperti terkait kawasan tanpa rokok dan barang milik daerah.

"Empat belas target Propemperda itu sudah kami tentukan waktu pembahasannya sesuai skala prioritas di tiap triwulan. Kami pastikan semua bisa kami tuntaskan 100 persen," ungkapnya.

Oleh karena itu meski di tahun 2026 masih dibayang-bayangi efisiensi anggaran namun Bapemperda

DPRD Kota Yogya memastikan tidak akan menjadi hambatan dalam proses pembahasan Propemperda. Baik dari tata kala pembahasan maupun kualitas produk hukum yang bakal ditelurkan. Bahkan jika dalam perjalanannya ada kebijakan dari undang-undang yang mengharuskan dilakukan penyesuaian raperda dalam tempo mendesak, maka hal itu juga bisa langsung ditindaklanjuti. Hal ini karena dengan target 14 produk hukum maka dinamika yang mungkin bisa terjadi di tingkat pusat, dapat dengan mudah ditindaklanjuti di daerah. (Dhi)-f

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1. | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005